PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UU NO 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Nilawati, Selamat Lumban Gaol

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta

Email : nilapermana1282@gmail.com

Abstract

Sexual violence is one of the problems that has long occurred in society in Indonesia and has become a major topic of discussion because it is very contrary to the moral values of Indonesian society. The government in Indonesia is trying to reform the law regarding the crime of sexual violence. Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence is here to answer the public's expectations so far regarding what steps the government will take in responding to the problem of sexual violence. Therefore, the formulation of the problem or discussion in this thesis is to find out how legal protection for victims of sexual violence is based on Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence and the implications of regulating legal protection for victims of sexual violence. safe during the legal process. The results of the research and discussion show that legal protection for victims of sexual violence as reviewed from Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence has played a role as part of criminal policy and social policy, which basically this legal reform has the aim of being part of the government's efforts to address the problem of sexual violence and provide legal protection to the community and is part of an effort to renew the substance of the law with the aim of making the existing law enforcement system more effective. Meanwhile, the implications of regulations relating to criminal acts of sexual violence have accommodated legal protection for victims of sexual violence in the form of guarantees of legal protection for the rights of victims.

Keywords: Legal Protection, Victims, Sexual Violence.

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan salah satu permasalahan yang sudah lama terjadi dalam lingkungan masyarakat di Indonesia dan telah menjadi perbincangan utama karena sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai moral masyarakat Indonesia. Pemerintah di Indonesia berupaya melakukan pembaharuan hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir untuk menjawab penantian masyarakat selama ini mengenai langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam menanggapi permasalahan kekerasan seksual. Oleh karena itu rumusan masalah atau pembahasan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta implikasi dari pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual tersebut. aman selama proses hukum berlangsung. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual telah berperan sebagai bagian dari kebijakan kriminal serta kebijakan sosial, yang pada dasarnya pembaharuan hukum ini memiliki tujuan sebagai bagian dari usaha pemerintah untuk mengatasi persoalan kekerasan seksual serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan merupakan bagian dari usaha memperbaharui substansi hukum dengan tujuan mengefektifkan sistem penegakan hukum yang ada. Sementara itu implikasi dari regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual telah mengakomodir perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berupa jaminan perlindungan hukum atas hak yang dimiliki korban.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Kekerasan seksual.

1. LATAR BELAKANG

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bagaimanapun kejahatan yang dilakukan, tetap termasuk kedalam pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Pasal 28 huruf g Undang-Undang Dasar 1945 pada ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Kejahatan dapat ditinjau berdasarkan tiga sudut pandang diantaranya sudut pandang sosiologis, yuridis, dan psikologis.¹ Kejahatan dalam sudut pandang psikologis yang saat ini tengah berkembang di masyarakat baik bentuk, objek, subjek, maupun tempat terjadinya kejahatan tersebut adalah berupa kejahatan terhadap kesusilaan seperti Pelecehan Seksual. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak tertulis secara jelas perihal istilah pelecehan seksual, namun istilah tersebut dapat digolongkan kedalam bentuk kejahatan terhadap kesusilaan ataupun kejahatan pencabulan yang tercantum didalamnya.

Kejahatan pencabulan menurut R. Soesilo dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan keji dan nafsu birahi. Kejahatan kesusilaan atau moral offenses dan pelecehan seksual atau sexual harassment adalah dua bentuk kejahatan atas kesusilaan yang bukan hanya merupakan masalah hukum nasional melainkan sudah menjadi masalah hukum global. Pelecehan seksual adalah jenis perilaku menyimpang yang dengan kondisi yang tidak diinginkan oleh seseorang, ajakan agar melakukan pelecehan seksual melalui lisan maupun nyata, di mana hal tersebut dapat terjadi di ruang publik. Kegiatan secara verbal dan aktual kini sering terjadi di arena publik, terutama bagi kaum wanita. Ini mendorong wanita tidak, tenang dan aman. Selain itu, perilaku tersebut dilakukan pada ruang terbuka dapat menyebabkan seseorang yang terkena perilaku tersebut semakin merasa tidak aman dan nyaman saat berada di luar rumah. Pada dasarnya setiap orang mempunyai pilihan agar memiliki rasa aman serta tenteram yang kuat dan jaminan terhadap bahaya ketakutan sebagaimana ditentukan pada Pasal 30 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pelecehan seksual adalah setiap perbuatan yang dilakukan mulai dari perbuatan pelecehan sampai perbuatan memaksa seseorang untuk berhubungan seksual asalkan tidak dengan persetujuan orang yang bersangkutan atau sebaliknya ketika korban tidak membutuhkannya dan berhubungan seksual dengan menggunakan cara-cara yang tidak wajar dan dibenci oleh orang yang bersangkutan dan menjauhkan kebutuhan seksual mereka. Perilaku pelecehan seksual yang tidak pantas memiliki tingkat yang sangat luas, berbagai jenis lisan dan tersusun, fisik dan bukan fisik, mulai dari artikulasi verbal (komentar menjijikkan, lelucon yang menarik secara fisik, dll) hingga struktur aktual

---

¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.29.

(menusuk, meraih, membelai, merangkul, dan sebagainya), menampilkan gambar-gambar eksplisit/vulgar, tindakan dengan paksaan yang memberontak, misalnya memaksa untuk mencium atau berpelukan, mengambil langkah-langkah untuk mempersulit wanita menolak menawarkan jenis bantuan seksual, hingga penyerangan. Kerap kali terjadi bahkan secara grafis terjadi perluasan aksi pelecehan seksual.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang kemudian disebut sebagai Komnas Perempuan, mengklasifikasikan pelecehan seksual ke dalam salah satu dari lima belas bentuk kekerasan seksual, dimana Komnas Perempuan sendiri mendefinisikan pelecehan seksual sebagai suatu Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Bagi penyintas kebrutalan seksual, Keamanan hukum bukan hanya masalah publik; itu juga merupakan masalah global² yang perlu ditangani ketika kasus diselesaikan. Kepuasan rasa aman bagi korban merupakan salah satu bentuk pemenuhan rasa keadilan di mata publik. Pelecehan seksual tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik melainkan juga verbal atau non fisik. Ucapan menggoda atau bernada seksual maupun siulan yang sengaja ditujukan kepada objek maupun hal lainnya yang mengarah kepada seksual sering dianggap sebagai hal yang biasa dan wajar terjadi di masyarakat. Padahal nyatanya tindakan seperti itu memiliki dampak buruk bagi objek dari perbuatan tersebut. Berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2021 memaparkan bahwa sebanyak 181 kasus pelecehan seksual terjadi di ruang publik dari 1.731 kasus yang terjadi atas kekerasan terhadap Perempuan. Dalam kasus-kasus demonstrasi kejahatan kekerasan seksual, secara praktis, hal itu paling banyak menimbulkan tantangan dalam penyelesaian perkara, baik pada tahap pemeriksaan, pendakwaan, maupun pada tahap jatuhnya putusan. Kondisi inilah yang kemudian mendorong hadirnya aturan tegas yang mengatur penghapusan kekerasan seksual untuk melindungi korban sebagaimana tertuang dalam RUU Pelanggaran Kekerasan Seksual (TPKS).³ RUU TPKS dibutuhkan di dua daerah. Pertama, bagaimana korban mendapatkan perlindungan dan keadilan agar aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan memiliki kewenangan hukum untuk bertindak; Kedua, soal pemisahan urusan privat dan urusan publik perlu diatur dalam RUU TPKS. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia tidak mengenal istilah perbuatan menyimpang, hal ini dikarenakan Bagian XIV Kitab⁴ Undang-Undang Hukum Pidana memuat Perbuatan Jahat Terhadap Perbedaan yang didalamnya terdapat istilah aksi yang memberontak yang diarahkan pada Pasal 289 sampai dengan 296. Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pelanggaran Bagian XIV tentang Pelanggaran kesusilaan menyebutkan bahwa yang bersangkutan diancam dengan pidana kurungan baik denda Rp. 4.000.500 atau hukuman maksimal dua tahun delapan bulan:

---

² Indah Aidina. "Gagasan Kriminalisasi Terhadap Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia" dalam JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.VI Edisi 2, Juli-Desember, hlm. 3.

³ Marzuki dkk. 1995. Pelecehan Seksual, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 41.

⁴ Marzuki dkk. 1995. Pelecehan Seksual, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 41.

1. Barangsiapa dengan sengaja dan terus terang menyalahgunakan toleransi.
2. Barangsiapa dengan sengaja dan di hadapan orang lain yang berada di sana meskipun dia berkeinginan sebaliknya, menyalahgunakan konvensionalitas.

Pasal 281 ayat (2) KUHP memberikan penjelasan bahwa “apabila seseorang dengan sengaja di depan orang lain diluar kesediaan orang tersebut melakukan suatu perbuatan asusila dapat dipidana penjara ataupun pidana denda”. Perbuatan yang dilakukan di ruang publik dan kesusilaan yang dimaksud dalam pasal ini adalah sama. Hal ini memberikan perspektif perlindungan kepada individu yang membutuhkan rasa aman, baik dari kata-kata yang ditujukan pada kegiatan yang mengabaikan kesusilaan. Pasal 315 KUHP⁵ menyatakan bahwa “setiap penghinaan yang sengaja dilakukan terhadap seseorang dengan tulisan maupun lisan di depan orang tersebut maupun melalui surat dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan yang mampu dipidana dengan penjara maupun pidana denda”. Upaya memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut: “Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis”. Pada kasus pelecehan seksual, faktor korban berperan penting dalam penegakan hukumnya. hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban enggan melaporkan kejadian yang menimpanya. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang menjadi payung hukum baru dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang TPKS disahkan pada tanggal 9 Mei 2022 melalui Lembaran⁶ Negara Tahun 2022 Nomor 120. Undang-undang ini merupakan *lex specialis* terhadap KUHP dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku selama ini. Hadirnya undang-undang ini dinilai sebagai dasar hukum yang sangat memadai dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang di dalam KUHP hanya mengatur pemidanaan terhadap tindak pidana kekerasan seksual secara umum.

RUMUSAN MASALAH

---

⁵ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Bandung, 2010 hlm.79

⁶ PAMPAS: Journal Of Kriminal, Volume 1 Nomor 2 Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana, Diakses pada tanggal 07 November 2024, pukul 20.00 WIB

1. Bagaimanakah regulasi tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum pidana Indonesia ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum korban kekerasan seksual berdasarkan UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?

3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui mengenai regulasi tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum pidana Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum korban kekerasan seksual berdasarkan UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Manfaat Penelitian

- 1) Dapat menambah pengetahuan para sarjana hukum baik praktisi, akademisi, dan masyarakat umum dalam pemahaman tentang regulasi tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum pidana Indonesia.
- 2) Dapat menjadi sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak terkait, baik yang terkait langsung khususnya maupun masyarakat umumnya mengenai perlindungan hukum korban kekerasan seksual berdasarkan UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif ini yang bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Ilmu Hukum dogmatik mengkaji, memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika, yang disebut kajian “doktrinal” atau disebut juga kajian hukum “normatif”.⁷

Menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) , pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan sejarah (historical approach), dengan cara mengkaji, menelaah, mengelompokkan peraturan perundang-undangan dan regulasi, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin ilmu hukum serta konsep-konsep hukum tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum pidana Indonesia dan perlindungan hukum korban kekerasan seksual dalam hukum pidana Indonesia dan perlindungan hukum korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual.

---

⁷ Saefullah Wiradipradja, Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Cet. 2, (Bandung: CV. Keni Media, 2015), hlm. 5.

Statue Approach adalah pendekatan dengan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya atau antara Undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-undang. Lihat, Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ed. Rev, Cet. 12, (Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2016), hlm. 133.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data secara kualitatif, dengan menyoroti masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya yang bertujuan untuk menemukan konsistensi dan kepastian hukum, dan tidak mempergunakan Teknik statistika, melainkan dilakukan secara naratif, deskriptif analitis.

5. LANDASAN TEORI

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu strafbaarfeit. Strafbaarfeit itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. Strafbaarfeit terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu straf, baar, dan feit. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah delict. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).”

Apabila diperhatikan rumusan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah peristiwa pidana sama saja dengan istilah delik, yang redaksi aslinya adalah strafbaarfeit. Pengertian peristiwa pidana atau delik di atas mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) digunakan sebagai landasan dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki induk peraturan hukum pidana positif, yakni KUHP. KUHP digunakan untuk mengadili perkara pidana yang bertujuan melindungi kepentingan umum. KUHP mengandung peraturan mengenai tindak pidana yang berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum.

Hukum pidana sendiri merupakan bentuk upaya hukum terakhir (ultimum remedium) dalam penyelesaian sebuah perkara. Untuk itu, hukum pidana mengandung sanksi yang bersifat memaksa. Masyarakat yang melanggar hukum pidana yang tertuang dalam KUHP maka akan dijatuhi sanksi pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu strafbaarfeit,. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Pengertian Tindak Pidana menurut para ahli

- Menurut Simons, merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.
- E. Utrecht, menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).

- Menurut Moeljatno, merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Pengaturan tindak pidana, dapat dilakukan analisis sesuai unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Untuk itu, harus diadakan penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya. Namun, jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi. Hal ini karena, mungkin tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang diancamkan suatu tindak pidana. Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada pelaku dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum. P. A. F. Lamintang lebih jauh menjelaskan bahwa apabila hakim berpendapat bahwa tertuduh tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya, maka hakim harus membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum atau dengan kata lain, hakim harus memutuskan suatu ontslag van alle rechtsvervolging, termasuk jika terdapat keragu-raguan mengenai salah sebuah elemen, maka hakim harus membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Unsur-unsur delik tercantum dalam rumusan delik yang oleh penuntut umum harus dicantumkan di dalam surat tuduhan (dakwaan) dan harus dibuktikan dalam peradilan. Bilamana satu atau lebih bagian ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus membebaskan tertuduh atau dengan perkataan lain harus memutuskan suatu vrijspraak.

Kekerasan seksual berasal dari suku dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan sexual hardness. Kata hardness mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Dengan demikian kekerasan seksual adalah perbuatan atau tindakan tidak menyenangkan terhadap seksualitas. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindakpidana kekerasan seksual menyatakan bahwa, Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

Kasus kekerasan seksual di Indonesia kian memprihatinkan, di mana laporan-laporan mengenai bentuk kriminalitas ini terus terkuak hampir tiap harinya. Fenomena-fenomena kejahatan terhadap kesusilaan terus meningkat dan berkembang di masyarakat, yang salah satunya terjadi dalam bentuk nyata berupa kekerasan seksual. Dalam waktu belakangan ini, fenomena kekerasan seksual merupakan hal yang begitu mencolok dan marak disorot oleh berbagai media dan masyarakat. Kejahatan tersebut terjadi dalam berbagai bentuk, objek, subjek, waktu

maupun lokasi terjadinya kejahatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekerasan seksual banyak terjadi dan menimpa kaum perempuan tanpa memandang status sosial apapun. Perempuan seringkali mengalami kekerasan, dan kekerasan yang dialami oleh perempuan tersebut merupakan suatu gejala sosial yang tidak dapat disembunyikan lagi. Hal itu dikarenakan, tindakan tersebut sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan manusia.

Tindakan kekerasan dapat mengakibatkan perusakan emosi, psikologi, seksual, fisik, dan/atau pun materiil. Selain itu adapun dampak terkait adanya kekerasan bagi perempuan diantaranya dapat mengurangi rasa percaya diri, mengganggu kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan, mengurangi otonomi perempuan didalam berbagai bidang seperti halnya ekonomi, politik dan budaya.

Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, istilah tindak kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) merupakan tindakan yang mencakup segala bentuk tindak kekerasan yang berbasis gender, baik terjadi dalam bentuk fisik, seksual, maupun emosional yang mengakibatkan perempuan mengalami penderitaan, termasuk didalamnya segala bentuk ancaman, intimidasi dan pelanggaran hak atau kemerdekaan perempuan baik secara terangterangan maupun secara sembunyi-sembunyi

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengklasifikasikan kekerasan seksual kedalam lima belas bentuk, diantaranya Perkosaan, Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan, Pelecehan Seksual, Eksploitasi Seksual, Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual, Prostitusi Paksa, Perbudakan Seksual, Pemaksaan Perkawinan termasuk cerai gantung, Pemaksaan Kehamilan, Pemaksaan Aborsi, Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi, Penyiksaan Seksual, Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan Kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Ini membuat kekerasan seksual masih menjadi topik yang terus disoroti, baik oleh pemerintah, maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan. Indonesia sendiri, telah berusaha memberantas kejahatan ini. Langkah terbaru, adalah pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS. kekerasan seksual diartikan sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang. Perbuatan yang dimaksud, timbul karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender. Ini penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang, dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Yang dimaksud dengan ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, adalah sebuah keadaan di mana seseorang menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan/atau penerimaan masyarakat, atau status sosialnya untuk mengendalikan orang lain. Sementara, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*), kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan. Tindakan ini dilakukan dengan unsur

paksaan atau ancaman. Termasuk dalam kekerasan seksual, adalah perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, dan pemaksaan prostitusi.

Pihak Komnas Perempuan juga menyertakan catatan bahwa daftar tersebut bukanlah daftar final karena bentuk kekerasan seksual dapat terus muncul dan beragam. Sedangkan, dalam UU TPKS, bentuk-bentuk kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual, mencakup beberapa hal sebagai berikut: Pelecehan seksual non fisik Pelecehan seksual fisik Pemaksaan kontrasepsi Pemaksaan sterilisasi Pemaksaan perkawinan Penyiksaan seksual Eksploitasi seksual Perbudakan seksual Kekerasan seksual berbasis elektronik Tak hanya itu, tindak pidana kekerasan seksual juga mencakup perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak. Lalu, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, serta pemaksaan pelacuran. Kemudian, meliputi juga tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Selain itu, tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perbuatan-perbuatan yang memuat kekerasan seksual, juga dimasukkan dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual.

6. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum pidana Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi Undang-Undang, diharapkan dapat memberikan perlindungan komprehensif terhadap korban, serta mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban. Selain itu juga dapat melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, serta menjamin tidak berulangnya kejadian yang sama. Kekerasan seksual merupakan tindakan serius dan membutuhkan solusi komprehensif salah satunya melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memuat berbagai terobosan hukum yang penting. Dari aspek hukum acara, telah menghasilkan beberapa terobosan hukum seperti terkait alat bukti, diakuinya Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat sebagai penyelenggara layanan terpadu. Selain itu, diakomodasi usulan terkait integrasi antar layanan sehingga kepentingan pemulihan korban bisa beriringan dengan dengan penegakan hukum. UU TPKS juga mengatur tentang hukum acara yang lebih modern dan terbaru. Hal itu dirancang untuk memberikan jaminan perlindungan bagi korban. Jaminan itu di antaranya UU TPKS yang mengatur atau mengakomodir visum serta pendampingan bagi korban seluas-luasnya. Tidak hanya itu, termasuk juga memberikan panduan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual, agar tidak memeriksa berulang-ulang, dan mengajukan pertanyaan sensitif dikarenakan hal tersebut bisa menimbulkan trauma Kembali kepada korban.

Undang-Undang ini mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Hak Korban, koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan bebas dari kekerasan seksual. Terdapat empat poin terobosan dalam UU TPKS, antara lain adalah:

1. Selain pengkualifikasian jenis TPKS, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya;
2. Terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan anpa intimidasi;
3. Hak Korban atas Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya TPKS menjadi kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban;
4. perkara TPKS tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.

Merujuk dokumen Undang-Undang yang diunggah di laman resmi Sekretariat Negara, terdapat 93 pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang itu memuat poin penting terkait tindak pidana kekerasan seksual, mulai dari jenis tindak pidana, hukuman bagi pelaku, hingga perlindungan bagi korban. Setiap jenis tindak pidana kekerasan seksual telah diatur rincian hukuman pidananya, termasuk sanksi denda terhadap pelaku. Diatur sebagai berikut :

- a. Pelecehan seksual nonfisik, Merujuk penjelasan UU TPKS, yang dimaksud dengan perbuatan seksual nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Pasal 5 UU TPKS mengatur bahwa pelaku perbuatan seksual nonfisik dapat dipidana hingga 9 bulan penjara dan denda maksimal Rp 10 juta.
- b. Pelecehan seksual fisik, Menurut Pasal 6 UU, pelaku pelecehan seksual fisik dapat dipidana hingga 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 300 juta. "Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)," bunyi Pasal 6 huruf a UU TPKS. "Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling

lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)," lanjutan Pasal 6 huruf b.

- c. Pemaksaan kontrasepsi, Seseorang yang memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi juga bisa dijerat pidana kekerasan seksual. Merujuk Pasal 8 UU TPKS, seseorang yang memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi hingga menyebabkan orang tersebut kehilangan fungsi reproduksinya sementara waktu dapat dikenai pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda Rp 50 juta.
- d. Pemaksaan sterilisasi, Tak hanya itu, seseorang yang memaksa orang lain untuk menggunakan alat kontrasepsi hingga menyebabkan fungsi reproduksi orang tersebut hilang permanen atau dengan kata lain memaksa sterilisasi juga bisa dinyatakan melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Menurut Pasal 9 UU TPKS, hukuman pelaku kekerasan seksual ini yakni penjara maksimal 9 tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta.
- e. Pemaksaan perkawinan, Pasal (10) UU TPKS menyebutkan bahwa pelaku perkawinan paksa bisa dipidana penjara paling lama 9 tahun dan denda maksimal Rp 200 juta. Perkawinan paksa yang dimaksud termasuk perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.
- f. Penyiksaan seksual, Pasal 11 UU TPKS mengatur bahwa pelaku penyiksaan seksual dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300 juta. Pelaku penyiksaan seksual sendiri didefinisikan sebagai pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan : intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga; persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya.
- g. Eksploitasi seksual, Pelaku eksploitasi seksual dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1 miliar. Mengacu Pasal 12 UU TPKS, pelaku eksploitasi seksual ialah setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain.
- h. Perbudakan seksual, Perbuatan perbudakan seksual diancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1 miliar. Mengacu Pasal 13 UU TPKS, pelaku perbudakan seksual ialah setiap orang yang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual.

i. Kekerasan seksual berbasis elektronik, Dijelaskan dalam UU TPKS bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik dapat dijerat pidana. Kekerasan seksual berbasis elektronik setidaknya dibagi menjadi 3 jenis, yakni:

- 1) Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar.
- 2) Membagikan atau mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual. Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan system elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Berdasarkan Pasal 14 UU TPKS, pelaku kekerasan seksual ini dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta. Selanjutnya, pada Pasal 14 Ayat (2) dijelaskan, apabila tindak kekerasan seksual berbasis elektronik itu dilakukan untuk melakukan pemerasan atau pengancaman dan memaksa atau menyesatkan dan/atau memperdaya, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300 juta. Tidak hanya pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

.B. Perlindungan hukum korban kekerasan seksual berdasarkan UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut peraturan hukum yang berlaku, yaitu dalam Pasal 1 ayat (8) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, arti dari Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Menurut Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, istilah kata korban memiliki pengertian yaitu orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, istilah kata korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual. Korban dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik bisa terjadi kepada siapa saja, baik kepada laki-laki maupun perempuan, terhadap anak, terhadap orang dewasa, bahkan terhadap kategori orang yang berlatar belakang penyandang disabilitas juga bisa menjadi korban kekerasan seksual. Jadi jenis-jenis korban bisa terjadi pada siapa saja terlepas dari jenis kelamin, umur, pendidikan, nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama, warga negara, latar belakang, maupun status sosial. Namun biasanya yang sangat rawan menjadi korban kejahatan kekerasan seksual adalah kaum perempuan. Perempuan dinilai sebagai makhluk lemah

yang kedudukannya selalu berada di bawah laki-laki. Perempuan seakan-akan menjadi objek kekerasan, dengan anggapan bahwa mereka adalah makhluk lemah dan tak berdaya. Pada akhirnya perempuan sering menerima perlakuan tak pantas dan dianggap sebagai makhluk yang lemah sehingga membuat perempuan berpotensi lebih besar menjadi korban kejahatan seksual. Tidak hanya perempuan, kategori rentan selanjutnya juga adalah terhadap anak-anak dibawa umur. KemenPPPA menyatakan Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan catatan KemenPPPA, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus pada 2022. Jumlah itu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni 4.162 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak juga perlu diperhatikan. Kategori anak yang rentan mengalami kekerasan seksual baik secara fisik maupun non fisik adalah anak remaja. Usia mereka masih dikatakan belum matang atau belum cakap, jadi bisa saja mereka mudah terpengaruh sehingga mempermudah para pelaku untuk melakukan kekerasan seksual. Di era modernisasi saat ini, usia remaja pada umumnya sudah mempunyai alat elektronik seperti handphone dan tentu saja tidak terlepas dari media whatsapp untuk berkomunikasi. Hal ini yang menjadi kerentanan bagi para anak-anak kategori remaja yang bisa saja menjadi korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Korban kekerasan seksual berbasis elektronik berhak mendapat perlindungan hukum. Jika dilihat dari segi perlindungan korban, maka Undang-Undang perlindungan saksi dan korban memberikan gambaran terkait hak-hak, dan bentuk perlindungan yang didapat untuk korban. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyatakan hak-hak korban sebagai berikut : Saksi dan Korban berhak :

Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam beberapa pasal yang diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian dalam undang-undang ini pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Selain kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana di atas negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak, serta kewajiban dan tanggung jawab yang paling penting adalah menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan serta memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-

cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang tinggal di daerah terpencil. Semoga amanah besar yang diberikan oleh undang-undang ini dapat dilaksanakan oleh negara, pemerintah dan pemerintah daerah demi mewujudkan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap anak yang merupakan generasi bangsa.

- **Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat**

Selain tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah, undang-undang ini pun memberikan amanah, tanggung jawab dan kewajiban kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak boleh lagi berpangku tangan dan bermasa bodoh dalam hal perlindungan kepada anak, diantara kewajiban dan tanggung jawab masyarakat diantaranya adalah melakukan kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Sehingga dalam hal ini organisasi masyarakat, akademisi dan pemerhati anak sudah seharusnya turun langsung ke lapangan melakukan pencegahan dengan jalan banyak melakukan edukasi dalam hal perlindungan kepada anak, sehingga kasus-kasus kejahatan terhadap anak (terutama kejahatan seksual) yang akhir-akhir ini banyak menghantui kita bisa diminimalisir .

- **Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua**

Selain undang-undang ini memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, undang-undang ini juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Karena pada kenyataannya orang tua lah yang paling dekat dengan sang anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis sang anak dan memantau pergaulan keseharian sang anak.

- **Kejahatan Seksual Terhadap Anak**

Salah satu kejahatan terhadap anak yang menjadi perhatian publik adalah kejahatan seksual yang akhir-akhir ini banyak terjadi di sekeliling kita, bahkan terkadang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan sang anak yang selama ini kita tidak pernah sangka-sangka, seperti kejahatan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya (baik ayah kandung maupun ayah angkat), bahkan pada tahun 2014 ada kasus yang menggemparkan dunia pendidikan yakni adanya kejahatan seksual yang terjadi di salah satu sekolah yang konon kabarnya "bertaraf internasional" yang "diduga" dilakukan oleh oknum pendidik, serta masih banyak kasus kejahatan seksual lainnya yang terjadi diberbagai pelosok nusantara.

Dahulu, kejahatan seksual terhadap anak dianggap tabu dan menjadi aib yang luar biasa, namun seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, kejahatan seksual terhadap anak sudah dianggap sesuatu hal yang tidak tabu lagi. Bahkan

pelaku kejahatan seksual terhadap anak, adalah pelaku-pelaku yang mempunyai trauma masa lalu, tentu masih segar dalam ingatan kita pelaku kejahatan seksual pada tahun 1996 yang terjadi di Jakarta yang dilakukan oleh Robot Gedek yang menyodomi 8 (delapan) orang anak dan selanjutnya membunuh anak-anak tersebut dan dari pengakuannya Robot Gedek mengaku puas dan merasa tak bersalah dan tidak takut masuk penjara apalagi dosa. Semua itu dilakukan demi kepuasan seksnya dan ia mengaku pusing kepala apabila dalam sebulan tidak melakukan perbuatan tersebut (www.museum.polri.go.id). Dalam kasus lain yang tidak kalah hebohnya terjadi pada tahun 2014 dimana jumlah korban pedofilia dengan pelaku Andri Sobari alias Emon, 24 tahun, telah mencapai 110 anak (tempo.co), ternyata baik Robot Gedek dan Emon mempunyai trauma masa lalu dalam hal pelecehan seksual. Maraknya kasus-kasus kejahatan seksual tersebut menjadi perhatian publik, sehingga publik pun mendesak supaya hukuman bagi pelaku kejahatan seksual lebih diperberat dan ketentuan minimalnya dinaikkan. Dalam undang-undang perlindungan anak yang lama ancaman pelaku kejahatan seksual hanya diancam dengan pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diubah dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebanyak Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Yang lebih khusus dalam undang undang ini adalah jika pelaku pemerkosaan atau pencabulan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

- Anak Penyandang Disabilitas

Dalam undang-undang ini juga sudah mengakomodir perlindungan hukum kepada anak-anak penyandang "disabilitas". Istilah "disabilitas" mungkin masih awam kita dengar apa yang dimaksud dengan "disabilitas". Istilah ini mulai dikenal dalam Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD). Dalam CRPD tersebut, penyandang disabilitas diartikan sebagai mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 lebih spesifik kepada pengertian anak penyandang disabilitas yaitu anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Sehingga, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, diharapkan sudah memberikan perlindungan hukum, persamaan derajat anak penyandang disabilitas dengan anak-anak yang normal, dan tidak ada lagi

diskriminasi kepada anak penyandang disabilitas. Dan hal tersebut merupakan tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas kepada anak-anak penyandang disabilitas, karena hal tersebut merupakan hak asasi anak-anak penyandang disabilitas.

- Restitusi

Hal yang sangat baru dalam sistem pemidanaan kita di Indonesia adalah adanya hak restitusi dalam undang-undang ini. Mendengar istilah restitusi mungkin kita belum mengerti apa yang dimaksud dengan "restitusi" walaupun mengenai restitusi ini sudah diatur dalam hukum positif kita di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia restitusi dapat berarti ganti kerugian, pembayaran kembali, pegawai berhak memperoleh pengobatan, penyerahan bagian pembayaran yg masih bersisa, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Berdasarkan gambaran tersebut di atas tentu kita sudah faham bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah adanya ganti rugi kepada korban. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 masalah restitusi hanya di atur dalam satu pasal yakni pada Pasal 71 D yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam penjelasan pasal tersebut di atas yang dimaksud dengan "restitusi" adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah anak korban.

Menurut UU Nomor. 23 Tahun 2004, Pasal 1 (3), seseorang yang dapat disebut sebagai korban KDRT adalah siapapun yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Sementara itu, pelaku KDRT dikategorikan Komnas Perempuan menjadi dua kelompok, yaitu negara dan non negara. Pelaku non negara meliputi suami, pasangan, ayah, ayah mertua, ayah tiri, paman, anak laki-laki, atau anggota keluarga laki-laki lainnya. Sementara itu, pelaku negara adalah pihak-pihak yang memiliki posisi tertentu di tingkat negara dan menggunakan kewenangannya untuk mengabaikan atau membiarkan kasus KDRT yang terjadi pada korban. Tidak hanya itu, penghambatan akses perempuan terhadap layanan, bantuan,

dan keadilan juga dapat dikategorikan sebagai KDRT. Bentuk-bentuk KDRT secara detail tertuang dalam empat pasal UU PKDRT. Berikut penjelasannya.

1. Kekerasan Fisik

Dalam Pasal 6 UU PKDRT, kekerasan fisik dikategorikan sebagai salah satu bentuk KDRT. Kekerasan fisik yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada korban.

2. Kekerasan Psikis

Dalam Pasal 7 UU PKDRT, kekerasan psikis dikategorikan sebagai salah satu bentuk KDRT. Kekerasan psikis yang dimaksud pasal tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada korban.

3. Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 8 UU PKDRT, kekerasan seksual dikategorikan sebagai salah satu bentuk KDRT. Dalam pasal ini, terdapat dua jenis kekerasan seksual, yaitu.

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga,

Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Dalam Pasal 9 UU PKDRT, kekerasan fisik dikategorikan sebagai salah satu bentuk KDRT. Terdapat dua poin yang dijabarkan dalam pasal 9 yang mengatur penelantaran rumah tangga sebagai KDRT, yakni. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

7. SIMPULAN

1. Regulasi tindak pidana terhadap pelaku kekerasan seksual menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu pelaku dipidana karena melakukan kekerasan seksual dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pelaku akan dikenakan pidana apabila didapati melakukan tindakan-tindakan kekerasan seksual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu korban akan diberikan jaminan hak-hak penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Adapun lembaga-lembaga khusus yang menjadi pendamping bagi korban kekerasan seksual antara lain petugas LPSK, UPTD PPA, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, psikiater, dan pendamping lainnya. Korban kekerasan seksual tentu saja mengalami

dan merasakan dampak kerugian akibat tindakan pelaku. Maka dari itu korban berhak mendapatkan bentuk ganti kerugian yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 berupa restitusi yang di terima oleh korban.

8. SARAN

1. Pemerintah sebagai aparaturnegara, untuk lebih memperhatikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, khususnya dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual agar lebih diperkuat proses penegakannya bagi pelaku, sehingga mendapat efek jera dan tujuan diperkuatnya regulasi hukum ini agar dapat mencegah dan meminimalisir keberulangan tindakan kekerasan seksual. Juga bagi lembaga-lembaga sosial terkait, agar dapat lebih meningkatkan perhatian terhadap masyarakat lebih khusus kelompok rentan yaitu perempuan dan anak-anak remaja, lewat pemberian sosialisasi yang berkaitan dengan Tindak Kekerasan Seksual ini guna mencegah dan melindungi masyarakat dari kekerasan seksual.
2. Bagi seluruh masyarakat khususnya kelompok rentan yaitu kaum perempuan dan anak dibawah umur, untuk lebih bijak dan paham hukum dalam memandang kasus kekerasan seksual, apabila didapati terjadi terhadap diri sendiri maupun orang sekitar, jangan takut dan ragu. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual berani melaporkan pada lembaga terkait maupun pihak berwajib dengan disertai bukti-bukti yang ada, segeralah melakukan langkah awal pencegahan, dan upayakan untuk banyak belajar memahami edukasi-edukasi pencegahan kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2002.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam, Ghalia Press, Jakarta 2004.
- Dikdik dan Elisatris, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020.
- I Gede A.B Wiranata, Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika dan Profesi Hukum), PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 2005).
- I Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

- Julaiddin, Penghukuman Tanpa Hakim Suatu Pendekatan dari Sudut Korban dalam Viktimologi, LPPM-UNES, Padang, 2019.
- John Kenedi, Perlindungan Saksi dan Korban dalam Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020.
- Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Marzuki Umar Saba, Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam, Cet. I Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- M. Arief Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah. Kekerasan Terhadap Perempuan ;Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan, Bandung : Refika Aditama,Bandung, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Ed. Rev, Cet. 12, Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2016.
- . Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3 Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press, 1986.
- Puspa, Yan P, Kamus Hukum, Semarang : Aneka Ilmu, 1997.
- P. A. F. Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013
- Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.
- Sajipto Rahardjo. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Suryono Ekotama dkk. Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana, Universitas Atma Jaya, 2001.
- . dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 1, Cet, 5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Susanti, Dyah Ochtorina & A'an Efendi. Penelitian Hukum (Legal Research), Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Wiradipradja, Saefullah. Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, cet 2, CV Keni Media, Bandung, 2015.
- Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik hakim, Kencana, Jakarta, 2013.

JURNAL

- Indah Aidina. "Gagasan Kriminalisasi Terhadap Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia" dalam JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.VI Edisi 2, Juli-Desember 2021. PAMPAS: Journal Of Kriminal, Volume 1 Nomor 2 Kebijakan Hukum Pembuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum

Pidana, 2021.

Ruby Hadiarti Johny. "Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan" dalam Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 11, Nomor 2, Mei 2011.

Selamat Lumban Gaol, "Penyelesaian Sengketa Pemakaian Nama Badan Hukum Perkumpulan Yang Terdapat Persamaan Pada Pokoknya Antara Satu Perkumpulan Dengan Perkumpulan Lainnya," publikasi Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 10 Nomor 2, Maret 2020, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, 2020), hlm. 96 – 132, {ISSN 2355-3278 (Media Cetak): ISSN 2656-4041

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang – Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di lingkungan Perguruan Tinggi.

.INTERNET

Komnas Perempuan. 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, melalui [https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-Pemantauan – detail / 15 – bentuk kekerasan – seksual – sebuah - pengenalan](https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-Pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan).

Komnas Perempuan. CATAHU 2021 , melalui [https://komnas perempuan .go.id/catatantahunan-detail/catahu-2021- perempuan-dalam-](https://komnas-perempuan.go.id/catatantahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-)

himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-
seksual.<https://gurupaiddikmas.kemdikbud.go.id/artikel/Artikel/pencegahan-kekerasan-seksual-di-satuan-paud>, diakses pada 29 Desember 2024.

Nasional Tempo.com, Berkaca Kasus Baiq Nuril Korban Pelecehan Seksual
Jangan Bungkam, melalui <https://nasional.tempo.co>

<https://katadata.co.id/berita/nasional/632daf96781b7/pengertian-kekerasan-seksual-dan-ketentuan-hukumnya-di-indonesia>